

MEREDAM IDEOLOGI RADIKAL DI INDONESIA MELALUI PRAKTIK KETELADANAN NILAI PANCASILA

Oleh
Maimun¹

Dosen Program Studi Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala

ABSTRACT

People's lives are driven by the basic idea of a foundation to fight for his life. The basic idea was referred to as an ideology, which dinyakini by a community or group as kosep ideal to strive for. In this world, there are two basic types of ideology, which is open and closed, and each country is based on the assurance ideology continue to be preserved. However, in addition to ideolgi countries, there are also other ideologies that are living within the individual which we refer to as personal ideology, and live in groups or as we say communal ideology. Radical ideology as a form of accumulation of trust on personal ideology was developed and dinyakini as a truth, that this ideology into the ideology of communal deliberately continue to be developed and championed by groups menyakininya. The group's ideology is contrary to Pancasila as the state ideology, and ways are being made to fight the ideology threatens people's lives and integrity of the country.

This paper aims to describe the efforts made to curb radical ideology through exemplary education. With the approach of the description, this paper adopts literature references juxtaposed with reality. In addition to the observation in reality, this paper also disadurkan reference libraries by lifting the state ideology as a national consensus as well as a comparison against the ideology of personal and communal dinyakini and championed by some kelompo. The end of this paper the authors suggest the need for optimization and actualization exemplary approach in an effort to curb radical ideology in Indonesia, which has the potential to live and thrive in the community, particularly areas that are still dominated by the nationalist ethno culture, such as Aceh, Papua, Kalimantan and some Another area in Sumatra and even regions of the island of Java, as well as other community organizations in Indonesia.

Keyword: Actualization, ideology, radical

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia dihadapkan pada dua aspek. Pertama, sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mudah dijadikan destinasi bagi orang asing, terlebih lagi di era global dan penuh dengan keterbukaan. Keterbukaan tersebut juga telah terbangun hubungan secara lebih intend an kompleks, baik dalam bidang bisnis, wisata dan juga pendidikan. Konsekuensi dari terbangunnya hubungan tersebut lebih memberikan keuntungan sepihak, yaitu keuntungan bagi orang asing. Kenyataan ini dapat dilihat dari contoh hubungan antara Indonesia dengan Rusia,

Amerika, Cina dan juga beberapa negara lainnya². Terkadang, bukan hanya alat-alat industri yang kita impor, bahkan garam-pun masih kita impor dari negara lain. Padahal kalau kita bandingkan dalam aspek Sumberdaya Alam (SDA), Indonesia lebih unggul dari negara lain, hanya saja masih kurang dalam aspek Sumberdaya Manusia (SDM). Konsekuensi dari hubungan yang tidak adil ini telah mendorong lahirnya kecemburuan sosial dari masyarakat tempatan yang kalah dalam persaingan, sehingga memunculkan berbagai bentuk manifestasi kecemburuan terhadap pihak asing, dalam hal ini kita sering menyebutnya *weapon of the week*³.

¹ Dosen Ilmu Politik pada program studi PKn FKIP dan Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Syiah Kuala.

² Indonesia sebagai negara pengekspor bahan baku disatu sisi, dan pengimpor alat-alat industri disisi lain, dengan perbandingan tingkat kerugian berada dipihak Indonesia. Artinya jumlah dan jenis yang diimpor tersebut tidak *balace*, jumlah ekspor hanya 20 % sedangkan jumlah impor 80 %.

³ Istilah *weapon of the week* ini sering *lakapkan* pada organisasi garis keras dan juga kelompok yang sering melakukan tindakan melawan hukum dengan cara melakukan teror terhadap obyek tertentu, sehingga mengakibatkan orang lain menjadi rugi atas perbuatan tersebut. Istilah ini juga sering dialamatkan pada kelompok teroris yang melakukan gerakan radikal sebagai bentuk protes atas kebijakan. Baca Nancy Snow, (2000) tentang laporan tim inspeksi senjata pembunuh missal di Iraq.

Kedua, Indonesia sebagai negara yang multikultural, dan didorong oleh keadaan masyarakat yang etno-nasionalis, sehingga rentan akan munculnya berbagai gerakan dan gesekan antar masyarakat yang satu dengan masyarakat lain yang berbeda dalam aspek budaya dan perilaku sosialnya. Keadaan ini juga telah menyebabkan negara kita secara tidak sengaja “terjebak” dalam iklim sosial dan politik yang mengarah kepada iklim liberal dan bertentangan dengan Pancasila. Sehingga berbagai organisasi garis keras dapat hidup subur dan berkembang di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir.

Dua konsekuensi ini semakin “menjerumuskan” bangsa kita pada suasana yang tidak menentu, suasana yang rumit, yang mengancam integritas negara Indonesia. Ancaman yang dimaksud adalah ancaman yang datang dari luar sebagai akibat dari adanya keterbukaan yang tanpa batas, dan bahkan juga ancaman yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri sebagai bentuk dari kurangnya kesadaran tentang nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi yang mengakui multikultural. Sikap yang terlalu lunak dan terlalu terbuka bagi negara lain menjadi ancaman tersendiri bagi negara Indonesia, juga iklim demokrasi yang mengarah pada praktek *liberal demoraction* yang telah mendorong tumbuh dan berkembangnya ideologi radikal dalam kehidupan bangsa Indonesia akhir-akhir ini.

Radikalisme sebagai suatu kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang, sekelompok orang terhadap ide-ide dan konsep-konsep atas idealitas yang akan dimanifestasikan dalam perbuatan untuk mewujudkan pencapaian visi dan misinya. Ideologi radikal sebagai ideologi yang ditolak oleh masyarakat Indonesia, baik yang terdapat pada individu, maupun yang terdapat dalam kelompok-kelompok tertentu. Ideologi radikal juga sebagai bentuk ancaman besar bagi Integrasi Nasional Indonesia. Realitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah dapat kita lihat betapa sistem pemerintahan dan sistem politik kita semakin rapuh akibat

dari manifestasi ideologi radikal tersebut.

Atas dasar pemikiran tersebut, penulis ingin menuangkan pemikiran tentang pentingnya pendidikan keteladanan sebagai bentuk anti radikalisasi yang selama ini muncul. Asumsi penulis bahwa salah satu strategi permanen yang harus dilakukan untuk meredam radikalisme ini adalah melalui pendidikan keteladanan, baik oleh orang tua, oleh guru di lingkungan sekolah dan oleh tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sosial. Pendidikan keteladanan sebagai bentuk investasi besar dalam membentuk karakter generasi penerus yang cinta tanah air dan bangsa serta memiliki *sense of belonging* dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dihadirkan konsep pendidikan keteladanan yang mampu meredam radikalisme yang telah berkembang dan hidup di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir.

B. TUJUAN PENULISAN

Atas dasar latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditentukan tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pemikiran kritis tentang upaya mengaktualisasikan kembali pendidikan keteladanan dalam meredam ideologi radikal di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. Konsepsi Keteladanan Nilai

Konsep dasar pendidikan adalah sebagai proses investasi dalam mewujudkan generasi yang berkualifikasi secara intelektual dan berkualifikasi secara spriritual. Ada dua tujuan dasar dari proses pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, yaitu: pertama, pendidikan sebagai proses *transfer of knowledge*, artinya pendidikan sebagai proses transformasi ilmu pengetahuan dari generasi yang satu kepada generasi yang lainnya melalui suatu proses yang terencana dan maksimal. Kedua, pendidikan juga sebagai proses *transfer of values*, artinya pendidikan sebagai proses pewarisan nilai-

nilai kepada generasi bangsa. Dua tujuan pendidikan tersebut sebagai usaha untuk mewujudkan generasi yang berilmu pengetahuan dan berakhlakul karimah. Pendidikan keteladanan sebagai bentuk dari proses transformasi nilai kepada generasi bangsa. Hal ini dilakukan oleh orang yang telah dewasa, baik yang ada dalam keluarga, lingkungan sekolah dan bahkan mereka yang ada dalam lingkungan masyarakat secara umum. Berkaitan dengan hal ini menjelaskan bahwa pendidikan keteladanan sebagai proses pewarisan nilai-nilai hidup dari generasi ke generasi, yang dilakukan secara sengaja dan terencana. Artinya keteladanan yang dimaksud yaitu berkaitan dengan sopan santun, akal budi dan juga keramah tamahan⁴.

Konsep pendidikan keteladanan juga kita kenal dengan *uswah al-hasanah*. Dalam sudut pandang pendidikan, *uswah al-hasanah* adalah keteladanan yang baik. Dengan adanya keteladanan yang baik itu akan menumbuhkan hasrat bagi orang lain untuk meniru atau mengikutinya. Seperti ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang baik dalam hal apa pun, merupakan suatu amaliah yang paling penting dan paling berkesan, baik bagi pendidikan anak maupun dalam kehidupan dan pergaulan manusia sehari-hari. Dengan demikian, keteladanan tidak hanya dipakai dalam proses pembelajaran di kelas saja, akan tetapi juga di luar ruang kelas.

Dalam sudut pandang pendidikan, *uswah al-hasanah* adalah keteladanan yang baik, karena dengan adanya keteladanan yang baik itu akan menumbuhkan hasrat bagi orang lain untuk meniru atau mengikutinya, dengan adanya contoh ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang baik dalam hal apa pun maka hal itu merupakan suatu amalia yang paling penting dan paling berkesan, baik bagi pendidikan anak, maupun dalam kehidupan dan pergaulan manusia sehari-hari.

Secara psikologis, ternyata manusia memang memerlukan tokoh teladan dalam hidupnya. *Taqlid* (meniru) adalah satu sifat pembawaan manusia. Peneladanan itu ada dua macam yaitu sengaja dan tidak

disengaja. Keteladanan yang tidak disengaja adalah keteladanan dalam keilmuan, kepemimpinan, sifat keikhlasan, dan sebagainya, sedangkan peneladanan yang disengaja ialah seperti memberikan contoh membaca yang baik dan mengajarkan hal yang benar. Keteladanan yang disengaja ialah keteladanan yang memang disertai penjelasan agar perintah atau meneladani. Dalam pendidikan, kedua keteladanan itu sama pentingnya⁵. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keteladanan ada yang datang dari kepribadian seseorang tanpa dibuat-buat atau bersifat alami ada juga yang disebabkan karena ia bertanggungjawab sebagai pimpinan. Artinya, dalam realitas, seorang pimpinan dan bahkan pimpinan partai politik, dan juga pimpinan organisasi publik lainnya harus mampu memberikan keteladanan bagi masyarakat umum. Presiden sebagai pimpinan tertinggi dalam suatu Negara harus mampu memberikan keteladanan yang baik bagi masyarakatnya, dalam hal ini keteladanan yang dimaksud adalah berkaitan dengan tupoksi sebagai seorang presiden.

Orang tua, guru dan juga tokoh masyarakat merupakan elemen yang bertanggungjawab memberikan keteladanan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Jean Piaget bahwa faktor yang memberikan pengaruh bagi seseorang itu ada tiga, yaitu faktor genitas, lingkungan keluarga dan lingkungan sosial⁶. artinya seorang anak dapat dikawal sejak dari dalam keluarga, dimana keteladanan dalam keluarga merupakan keteladanan utama yang akan diterima oleh seorang anak, jadi pendidikan dalam keluarga harus diarahkan lebih maksimal pada aspek perkembangan moral anak. Sehingga, anak akan menerima nilai-nilai utama yang diwariskan oleh keluarganya.

Kemudian, dalam lingkungan sekolah, guru sebagai elemen kedua yang memiliki tanggungjawab untuk memperkuat tata nilai bagi peserta didiknya. Dalam hal ini, guru dengan orang tuas siswa harus mampu membangun suatu pola kerjasama yang inten menyangkut

⁴Syaiful bahri: makalah yang disampaikan pada seminar hasil penelitian pendidikan karakter di Universitas Syiah Kuala tahun 2010

⁵Roqib, Nurfuadi. *Kepribadian Guru*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media. 2009

⁶Jean Piaget (1896-1980) dalam Nurfuadi (2009) tentang kepribadian seorang guru pada bagian perkembangan manusia disebutkan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang anak, hal.35

dengan upaya penguatan moral bagi anak-anak pada tahap kedua. Selanjutnya, dalam lingkungan sosial, tokoh adalah teladan dalam lingkungan masyarakat. Sebagaimana Nabi Muhammad sebagai tokoh teladan bagi segenap manusia. Maka peran tokoh amatlah penting untuk dimunculkan dalam memberikan keteladanan yang baik bagi masyarakat dan generasi muda. Cara-cara yang dilakukan dapat berupa bijak dalam bicara, bijak dalam mengingatkan atau menegur dan bahkan bijak dalam mengambil keputusan.

Orang tua, guru dan tokoh dalam masyarakat sebagai teladan bagi suatu generasi, maka oleh karena itu diperlukan suatu kerjasama yang lebih inten antara tiga golongan tersebut, agar generasi penerus bangsa tetap terjaga dan terkawal dalam masa perkembangan moralnya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai elemen resmi juga harus turut ambil andil secara serius untuk merumuskan suatu pola kerjasama mewujudkan generasi yang cinta damai, cinta kebijaksanaan dan cinta akan perbedaan. Indonesia adalah Negara yang multicultural, pendidikan keteladanan yang dimaksud dengan mengarah pada penguatan nilai-nilai keberagaman pada diri generasi penerus bangsa.

2. Konsepsi Ideologi dan Ideologi Pancasila

Teori dan konsep yang diangkat sebagai “pisau” analisis dalam tulisan ini, maka diadopsi-lah beberapa pemikiran pakar dengan dasar filosofi ideologi dan perkembangannya. Selain mengadopsi pemikiran tersebut, dalam tulisan ini juga diadaptasikan konsep dan perkembangan ideologi pancasila yang menjadi ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga tergolong sebagai ideologi terbuka. Bagi Gramsci, Ideologi bukan sekedar ide atau pemikiran yang terakumulasi pada satu konsep pemahaman tentang sistem kehidupan seperti sosialisme, kapitalisme, dan komunisme. Ideologi bersifat dinamis karena merupakan hasil pemikiran para intelektual dan filosof tertentu. Ideologi organik dan bersifat historis merupakan

pemahaman ideologis yang utuh dan memberikan pedoman kehidupan yang bersifat abstrak dan konkrit. Ideologi organik dan bersifat historis adalah ideologi yang diperlukan dalam kondisi sosial tertentu: “sejauh ideologi itu secara historis diperlukan, ia mempunyai keabsahan bersifat psikologis: ideologi mengatur manusia, dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, dan sebagainya⁷”.

Berdasarkan penjelasan Ideologi Gramsci di atas, Roger Simon (1999:84) menyimpulkan, ideologi bukanlah sesuatu yang berada di awang-awang dan berada diluar aktifitas politik atau aktifitas praktis manusia lainnya. Sebaliknya, ideologi mempunyai eksistensi materialnya dalam berbagai aktifitas praktis tersebut. Ia memberikan berbagai aturan bagi tindakan praktis serta perilaku moral manusia, dan ekuivalen dengan agama dalam makna sekulernya, yaitu satunya pemahaman antara konsepsi dunia dan norma tingkah laku. Oleh karena itu, ideologi merupakan pedoman atau aturan yang mengatur manusia dalam bertindak untuk mencapai orientasi politik maupun ekonomi.

Untuk memahami hakikat ideologi atau orientasi perjuangan, maka kelas pekerja harus dilakukan reformasi intelektual dan moral. Karena dengan demikian kelas pekerja dapat memahami eksistensi perjuangan. Dan itulah sebabnya, Gramsci menjadikan reformasi moral dan intelektual menjadi elemen pokok dari hegemoni kelas pekerja. Roger Simon mengatakan: “dengan membaca *Prison Notebooks* kita tahu bahwa Gramsci memakai berbagai istilah yang menurutnya ekuivalen dengan ideologi seperti kebudayaan, filsafat, pandangan dunia, atau konsepsi mengenai dunia, demikian pula istilah “Reformasi moral dan intelektual” ketika ia membicarakan transformasi kesadaran sebagai prasyarat perbaikan menuju sosialisme.

Siapakah yang akan membunikan ideologi terhadap kehidupan orang lain? Gramsci mengatakan, yang membunikan

⁸Magnis-Suseno, Franz. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Jakarta: Kanisius, 1992

ideology dan melakukan reformasi intelektual dan moral adalah intelektual organik. Konsep intelektual organik dilahirkan melalui kajian Gramsci tentang kemenangan revolusi *Risorgimento Italia*, Gramsci menunjukkan bagaimana peran pemimpin Partai Moderat Italia berhasil melaksanakan tugas tersebut untuk kaum borjuis Italia dengan cara membangun blok ideology yang mendapat perhatian luas di seluruh negara tersebut, bahkan aktivis Partai Aksi Italia sebagai oposisi sebagian besar menyeberang ke Partai Moderat. Oleh karena itu, Gramsci mengajarkan kepada kelas pekerja agar menjadi Intelektual Organik untuk mencapai posisi hegemonik. Ideologi dapat dipraktikkan dalam kehidupan nyata atau aktifitas sehari-hari oleh siapapun terutama oleh masyarakat sipil dan masyarakat politik. Semua kelompok masyarakat masyarakat berhak menyebarkan dan mempertahankan nilai-nilai ideologi yang dimiliki. Roger Simon mengatakan “Ideologi mempunyai eksistensi materialnya dalam artian bahwa ia menjelma dalam praktik-praktik sosial setiap orang dan dalam lembaga-lembaga serta organisasi-organisasi dimana praktik-praktik sosial tersebut berlangsung. Organisasi ini mencakup partai politik, serikat dagang dan organisasi lain yang menjadi bagian dari masyarakat sipil; aparat negara; dan organisasi-organisasi ekonomi seperti industry dan perusahaan komersial serta lembaga keuangan⁹”.

Ideologi yang tingkat kemanjurannya diakui adalah ideologi yang hegemonik, yakni mampu menyatukan berbagai kepentingan kedalam kepentingan ideologi yang dimiliki. Kepentingan ideologi yang diharapkan oleh Gramsci adalah kepentingan nasional-kerakyatan. Bagi Gramsci, ideologi tidak dapat dinilai sebagai kebenaran atau kesalahan, tetapi harus dinilai dari kemanjurannya dalam mengikat berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda ke dalam satu wadah, dan dalam peranannya sebagai pondasi atau agen proses penyatuan sosial. Suatu kelas hegemonik adalah kelas yang berhasil dalam menyatukan kepentingan-

kepentingan dari suatu kelas, kelompok dan gerakan-gerakan lain kedalam kepentingan mereka sendiri dengan tujuan membangun kehendak kolektif rakyat secara nasional.

Perjuangan ideologi harus menyesuaikan dengan nilai-nilai sosial politik yang berkembang. Berikut Roger Simon mengutip Gramsci: “Kritik ini memungkikan berlangsungnya proses diferensiasi dan perubahan yang dulunya menjadi unsur-unsur ideologi lama. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai masalah kedua dan tidak diperlukan, atau bahkan hanya bersifat sementara, sekarang dianggap sebagai hal pokok-yaitu menjadi inti dari kemajemukan baru yang bersifat ideologis dan teoritis. Kehendak kolektif lama larut ke dalam elemen-elemen yang bertentangan karena elemen-elemen subordinat berkembang secara sosial, dan sebagainya¹⁰”.

3. Tipe Ideologi

Terdapat dua tipe ideologi sebagai ideologi suatu negara. Kedua tipe tersebut adalah ideologi tertutup dan ideologi¹¹ terbuka. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Kebenaran suatu ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. Isinya dogmatis dan apriori sehingga tidak dapat dirubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Karena itu ideologi ini tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain.

Salah satu ciri khas suatu ideologi tertutup adalah tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar saja, tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. Ideologi tertutup tidak mengakui hak masing-masing orang untuk memiliki keyakinan dan pertimbangannya sendiri. Ideologi tertutup menuntut ketaatan tanpa *reserve*.

Ciri lain dari suatu ideologi tertutup

⁹ Mannheim, Karl. *Ideologi dan Utopia: Menyinkap Kaitan Pikiran dan Politik*. Judul Asli: *Ideology and Utopia, An Introduction to the Sociology of Knowledge*. Penerjemah: F. Budi Hardiman. Jakarta: Penerbit Kanisius, 1998.

¹⁰ Notonagoro. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Cetakan keempat. Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun.

adalah tidak bersumber dari masyarakat, melainkan dari pikiran elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. Sebaliknya, baik-buruknya pandangan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat dinilai sesuai tidaknya dengan ideologi tersebut. Dengan sendirinya ideologi tertutup tersebut harus dipaksakan berlaku dan dipatuhi masyarakat oleh elit tertentu, yang berarti bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara yang totaliter.

Contoh paling baik dari ideologi tertutup adalah Marxisme-Leninisme. Ideologi yang dikembangkan dari pemikiran Karl Marx yang dilanjutkan oleh Vladimir Ilianov Lenin ini berisi sistem berpikir mulai dari tataran nilai dan prinsip dasar dan dikembangkan hingga praktis operasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ideologi Marxisme-Leninisme meliputi ajaran dan paham tentang (a) hakikat realitas alam berupa ajaran materialisme dialektis dan ateisme; (b) ajaran makna sejarah sebagai materialisme historis; (c) norma-norma rigid bagaimana masyarakat harus ditata, bahkan tentang bagaimana individu harus hidup; dan (d) legitimasi monopoli kekuasaan oleh sekelompok orang atas nama kaum proletar¹².

Tipe kedua adalah ideologi terbuka. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial-politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara apriori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Dengan sendirinya ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya dapat ada dan mengada dalam sistem yang demokratis.

4. Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi Negara yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan tujuan

bernegara dan hal ini menjadi kesepakatan pertama dalam pendirian negara. Lima prinsip dasar Panca-sila itu mencakup sila atau prinsip (i) Ketuhanan Yang Maha Esa; (ii) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (iii) Persatuan Indonesia; (iv) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal berne-gara, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejah-teraaan umum; (ii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam kon-teks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Terminologi Pancasila sebagai ideologi terbuka sesungguhnya telah dikembangkan pada masa orde baru. Namun dalam pelaksanaannya pada masa itu lebih menunjukkan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Pancasila menjadi alat hegemoni yang secara apriori ditentukan oleh elit kekuasaan untuk mengekang kebebasan dan melegitimasi kekuasaan. Kebenaran Pancasila pada saat itu tidak hanya mencakup cita-cita dan nilai dasar, tetapi juga meliputi kebijakan praktis operasional yang tidak dapat dipertanyakan, tetapi harus diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan kedua dan ketiga sebagai penyangga konstitusionalisme, yaitu

¹²*Ibid.*, hal. 232-233

kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*) dan Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prose-dur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*). Kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mungkin dicapai jika sistem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.

D. PENUTUP

Indonesia sebagai Negara yang berazaskan pancasila mengakui adanya keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia juga dipengaruhi oleh kesepakatan *the funding father* Negara ini, yaitu menjadikan pancasila sebagai ideology dasar berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan keteladanan diperlukan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia penuh dengan toleransi dan cinta damai, dengan demikian, ideologi radikal akan dapat ditekan semaksimal mungkin.

E. DAFTAR PUSATAKA

- Asshiddiqie, Jimly dan Mustafa Fakhry. *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD, UU dan Peraturan di 78 Negara*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia, 2002.
- Attamimi, A. Hamid A. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*. Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta, 1990.
- Bahar, Saafroedin Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (peny.). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945–22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. translated by: Anders Wedberg. New York: Russell & Russell, 1961.
- _____. *Pure Theory Of Law*. Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition. Translated by: Max Knight. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1967.
- Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Heaven and London: Yale University Press, 1999.
- Magnis-Suseno, Franz. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Jakarta: Kanisius, 1992.
- Mannheim, Karl. *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan*

Politik. Judul Asli: Ideology and Utopia, An Introduction to the Sociology of Knowledge. Penerjemah: F. Budi Hardiman. Jakarta: Penerbit Kanisius, 1998.

Notonagoro. *Pancasila Dasar Falsafah Negara.* Cetakan keempat. Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun.

Nancy Snow. *Inspeksi Senjata Pembunuh Missal Di Iraq.* Jakarta: Yayasan Obor. 2000.

Roqib, Nurfuadi. *Kepribadian Guru.* Yogyakarta: Grafindo Litera Media. 2009.